

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI**

**HILIR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN**

**MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI (STUDI DI KECAMATAN**

**TEMBILAHAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**RANGGA MAHARESTU**

**NPM : 167310806**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : RANGGA MAHARESTU  
NPM : 167310806  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kinerja metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Ketua program studi  
Ilmu pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.SI

Syaprianto, S.Sos, M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : RANGGA MAHARESTU  
NPM : 167310806  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Syaprianto, S.Sos, M.IP

  
Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Anggota

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHANSKRIPSI**

Nama : RANGGA MAHARESTU  
NPM : 167310806  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

  
Syaprianto, S.Sos, M.Ip

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketun,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadian ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)**". Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan serta pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak, Prof.Dr.H Syafrinaldi, SH, MCL, karena saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si karena selalu mendukung dan menjadi motivator saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Syaprianto,S.Sos, M.Ip Selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus orang tua saya yang telah banyak memberikan masukan , bimbingan dannasehat dengan sabar pada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Seluruh staf Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat-menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau serta teman-teman saya yang membantu memberikan masukan dan saran-sarannya pada penulis.
8. Terutama kepada Papa dan Mama yang selalu ada bagi penulis dalam masa sesulit apapun selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan tiada batas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga amal dan ibadahnya dibalas oleh ALLAH SWT, amin.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Penulis,

Rangga Maharestu

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>21</b>
A. Studi Kepustakaan.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Pikir .....	40
D. Konsep Operasional .....	41
E. Operasional Variabel.....	42
<b>BAB III : TIPE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43

B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
<b>BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
B. Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan.....	58
C. Struktur Organisasi.....	60
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden.....	62
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).....	65
C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan).....	89
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>112</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1:	Jumlah ibadah di kabupaten Indragiri Hilir.....	14
Tabel I. 2:	Data Masjid, Mushalla di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	15
Tabel I.3:	Data penduduk beragama islam.....	16
Tabel II. 1:	Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel II. 2:	Operasional variable penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).....	42
Tabel III. 1:	Informan Penelitian.....	45
Tabel III. 2:	Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).....	52
Tabel IV. 1:	Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten indragiri Hilir.....	56
Tabel IV. 2:	Tempat Sarana Ibadah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.....	57
Tabel V. 1:	jumlah responden berdasarkan umur tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).....	62

Tabel V. 2: Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenjang Pendidikan Formal tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan). .....	63
Tabel V. 3: Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenis Kelamin tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan). .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1: Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan) ..... 40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Wawancara Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi Di Kecamatan Tembilahan) ..... 116
2. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi Di Kecamatan Tembilahan)..... 118



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Maharestu  
NPM : 167310806  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Maret 2021  
Pelaku Pernyataan,



**Rangga Maharestu**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN  
MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI (STUDIDI KECAMATAN  
TEMBILAHAN)**

**RANGGA MAHARESTU**

**ABSTRAK**

*Kata kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan). Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM) di Indonesia merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia. Indikator penilaian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan) yang di pergunakan Menurut Teori Edward III meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode Analisis ialah kualitatif yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Kasubag Kesra, Kepala TU Kemenag, Kelurahan, Tenaga Pengajar, Tokoh Agama dan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan susunan dan tujuan penelitian maka untuk menentukan sampel peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun data yang diperoleh secara langsung. Sementara untuk analisis data yang dipergunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan) sudah terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama mengenai pengawasan, motivasi serta kerjasama untuk terselenggara Peraturan daerah.

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF INDRAGIRI  
HILIR DISTRICT NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING COMMUNITY  
MOVEMENT OF MAGHRIB MENGAJI (STUDY IN TEMBILAHAN  
DISTRICT)**

**RANGGA MAHARESTU**

**ABSTRACT**

*Keywords: Communication, Resources, Attitudes, Bureaucratic Structure*

The purpose of this study is to determine the implementation of Indragiri Hilir District Regulation Number 2 of 2016 concerning the Maghrib Mengaji Community Movement (Study in Tembilahan District). The Maghrib Mengaji Community Movement (GMMM) in Indonesia is a program of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Indicators for assessing the implementation of the Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Maghrib Mengaji Community Movement (Studies in Tembilahan District) which are used according to Edward III's theory include Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The method of analysis is qualitative, which is a process of investigation to understand social problems or human problems based on the creation of holistic images that are formed with words, reporting the views of informants in detail, and arranged in a scientific setting. In this study, the informants were the Head of Sub-division for People's Welfare, Head of Administration for the Ministry of Religion, Kelurahan, Teaching Personnel, Religious and Community Leaders. Based on the consideration of the structure and research objectives, to determine the sample, the researcher used interview, observation and documentation techniques. Furthermore, secondary data obtained from literature studies, documentation studies and data obtained directly. Meanwhile, for data analysis used data reduction, data presentation, drawing conclusions. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 2 of 2016 concerning the Maghrib Mengaji Community Movement (Study in Tembilahan District) already done. Recommendations that need to be considered are mainly regarding supervision, motivation and cooperation for implementing regional regulations.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang tercatat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggungjawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan kenegaraan. Pemerintah yaitu alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk tercapai tujuan Negara sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta untuk mengkoordinasikan agar tujuan Negara dapat tercapai.

Dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan bahwa azas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sebagaimana tercantum dalam



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud menjalankan tugas dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Asas Desentralisasi adalah peyebaran urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada penjabat-penjabat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan terhadap aturan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan, keadaan serta kebutuhan dari setiap daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan, serta dalam pasal 9 menyatakan adanya klasifikasi mengenai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan tersebut yaitu menyangkut adanya urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Klasifikasi urusan pemerintahan absolut dalam pasal 10 ayat (1) meliputi urusan:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama;

Dimana hal-hal tersebut di atas yaitu urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan dari pemerintah pusat sepenuhnya yang dilaksanakan sendiri, akan tetapi pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yaitu perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non- kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka dekonsentrasi.

Adapun urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah-daerah provinsi dan daerah- daerah kabupaten/kota yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). Urusan pemerintahan konkuren ini menjadi kewenangan daerah berdasarkan Pasal 11 terdiri

atas urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan mengenai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan rakyat;
6. **Sosial;**

Adapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertahanan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan ;
18. Kearsipan;

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi;

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan guna mendukung terjadinya proses perubahan dalam diri seseorang ke arah yang lebih baik. Adapun pendidikan adalah suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan merupakan sektor yang dapat menciptakan kecerdasan kehidupan manusia. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar tersebut pemerintah kemudian membuat undang-undang pendidikan yang diantara isinya mengatur tentang pendidikan agama dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai salat Ashar maupun ba'daa

Maghrib.

Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tidak ubahnya lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik. Namun kini, seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan anak-anak mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser keruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau mereka beralih kewarung-warung internet maupun warung game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna. Mengaji yang biasa dilakukan sehabis sholat terutama seusai sholat maghrib tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang membanggakan, melainkan sebaliknya, seolah menjadi hantu yang harus dihindari “anak-anak sudah menjauh dari Rumah Allah”.

Dalam kehidupan manusia, membaca merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar diawali dari hal membaca. Dengan membaca, manusia dapat mengetahui apa yang belum diketahuinya dan mendapatkan ilmu baik pengetahuan umum atau pun pengetahuan agama. Dengan kata lain membaca berarti berbuat atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang berbentuk teks atau tulisan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan informal yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta masyarakat berakhlak mulia, maka Pemerintah menindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan jangka panjang, salah satu wujudnya adalah dalam bentuk program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM).

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM) di Indonesia merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang pertama kali dideklarasikan pada tanggal 30 Maret 2011 di Istora Senayan oleh Menteri Agama Suryadarma Ali. Program ini dimaksudkan untuk membiasakan kembali mengaji/membaca kitab suci Al-Qur'an sesudah sholat Maghrib, yang akhir-akhir ini kebiasaan tersebut sudah terkikis oleh kemajuan informasi dan teknologi. Disamping memiliki tujuan agar masyarakat kembali mencintai Al-Quran, gerakan nasional ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman yang aktif kepada masyarakat tentang makna dan kandungan Al-Quran.

Arus perkembangan zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur, dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-lebih di perdesaan. Dan akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia termasuk budaya maghrib mengaji.

Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah-langkah konstruktif untuk menghidupkan dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan mengakar di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, yaitu Melalui Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Upaya ini dilakukan untuk mengajak kembali masyarakat muslim Indonesia untuk kembali memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid.

Dalam rangka mewujudkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan pengetahuan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa serta dalam menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir. Kesra adalah kesejahteraan rakyat yang melaksanakan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Tembilahan karena kesra ditunjuk secara langsung oleh bupati Indragiri Hilir. Sebelum melakukan penunjukan terlebih dahulu bupati Indragiri Hilir melakukan koordinasi dengan pihak instansi-instansi terkait termasuk Kementerian Agama untuk membahas lebih lanjut dari program Gemmar Mengaji termasuk membahas siapa pelaksana dari program ini terlepas dari hasil koordinasi tersebut maka Bupati Indragiri Hilir secara langsung menunjuk kesra sebagai pelaksanakarena kesra terdapat 3 Kasubag (Kepala SubBagian) yang pantas melakukan program Gemmar Mengaji ini yaitu:

- a. Kasubag Agama bina mental dan spiritual
- b. Kasubag pendidikan dan kebudayaan
- c. Kasubag kemasyarakatan sosial

Maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, Agar dikeluarkannya perda tersebut untuk memasyarakatkan gemar mengaji dan mengaktifkan masyarakat mengaji dan mempelajari Al-Qura'an. Adapun Tujuan diadakan perda ini adalah :

- a. Untuk dijadikan sebagai dasar dan sekaligus untuk hukum bagi Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir dan masyarakat dalam melaksanakan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

- b. Menciptakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang agamis dan memiliki moral dan akhlak yang mulia.
- c. Menjadikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakter keagamaan yang kuat.
- d. Mengaktifkan umat islam mempelajari dan membaca Al-Qur'an pada waktu maghrib di Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Memahami pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta aksara Al-Qur'an.

Dalam perda nomor 2 tahun 2016 pasal 3 disebutkan Gemar mengaji bertujuan:

- a. Membangkitkan kembali budaya mengaji dilingkungan masyarakat;
- b. Memperkuat pemahaman nilai-nilai Al-Qur'an sebagai tuntunan kehidupan masyarakat;
- c. Mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama islam dan memberantas buta aksara Al-Qur'an sehingga membentuk pribadi yang berakhlakul kerimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat; dan
- d. Mewujudkan masyarakat dalam suasana aman, damai, harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya sesuai dengan misi daerah.

Dalam perda nomor 2 tahun 2016 pasal 8 disebutkan Kewajiban masyarakat dalam Gemar Mengaji adalah meliputi:



- a. Menghidupkan dan melakukan kegiatan Gemar Mengaji di Mesjid, Mushalla/Surau di Lingkungan tempat tinggal atau dirumah masing-masing.
- b. Bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan Gemar Mengaji di Masjid, Mushalla/Surau dengan pengawasan tenaga pengajar
- c. Setiap orang tua berkewajiban melakukan pengawasan dan memotivasi anak-anak dalam menyemarakkan gemar Mengaji
- d. Setiap guru pada setiap jenjang pendidikan menganjurkan kepada pesertab didiknya untuk mengikuti program Gemar mengaji; dan
- e. Bagi penyuluh agama fungsional PNS dan penyuluh agama non PNS, memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan Gemar Mengaji.

Sebagaimana program tersebut dalam pelaksanaannya didukung penuh oleh pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Tembilahan. Program tersebut dikemas oleh Pemerintah Kecamatan Tembilahan yang di kenal sebagai program GEMMAR Mengaji (Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji). Pencanaan program ini pada awal tujuannya ialah untuk mewujudkan Tembilahan sebagai kota yang agamis dan menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Qur'an atau mengaji setelah shalat Maghrib.

Namun seiring perjalanan kebijakan program itu, banyak ditemukan fenomena yang menunjukkan antara konsep kebijakan dan pelaksanaan teknis program GEMMAR Mengaji ini saling berjauhan di Kecamatan Tembilahan. Hal ini terjadinya karena ketidakmampuan perumus kebijakan dan implementator memprediksi masalah

yang muncul diluar dugaan, akibatnya kebijakan itu tidak efektif di masyarakat. Kenyataannya di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir kebijakan program ini belum mendapat respon secara menyeluruh di lapangan, masih banyak warga yang belum menerapkan kebijakan mulia itu. Contohnya seperti orang tua yang seharusnya membimbing anak-anaknya dalam membaca Al- Qur'an lebih asyik menonton acara-acara televisi dan anak-anaknya mereka beralih ke warung-warung internet maupun kios game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpamakna

Usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al-Our'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan, dan pengamalan Al-Our'an dalam kehidupan sehari-hari menjadi keniscayaan adanya. Oleh karenanya, maka perlu diupayakan langkah-langkah kongkrit dan sistematis, agar program dan kegiatan di setiap lembaga dan kelompok masyarakat dapat terus terpelihara dengan baik, berkelanjutan dan memiliki nilai manfaat dalam meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan.

Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini masuk kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa dilihat pada peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir No 2 Tahun 2016 pasal 16 yaitu;

1. Pembiayaan pelaksanaan Gemar Mengaji berasal dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Bantuan operasional masyarakat magrib mengaji;
  - b. Insentif tenaga pendidik masyarakat magrib mengaji;
  - c. Bantuan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat magrib mengaji;
  - d. Dan lain-lain.
3. Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Hasil observasi di lapangan bahwa Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir untuk setiap tenaga pengajar yang ada di tembilahan yaitu senilai Rp.300.000.00. jika dihitung untuk per 6 bulan sekali maka hasilnya untuk setiap tenaga pengajar memperoleh jumlah dengan total Rp.1.800.000.00.akan tetapi masih adanya tenaga pengajar yang tidak mendapatkan upah insentif yang tidak sesuai dengan perda Gemmar Mengaji, karena sudah dijelaskan dalam Perda Gemmar Mengaji pasal 16.

Harapan masyarakat dari pelaksanaan program ini, setidaknya bermanfaat untuk :

1. Melestarikan tradisi “mengaji”, bertadarus, serta mengkaji Al-Quran dan ilmu agama selepas shalat magrib dalam rangka meningkatkan kualitas keshalehan individual dan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kualitas ketaatan beragama melalui pembiasaan belajar agama.

2. Membentuk sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai islam yang diukur dari integritas, kejujuran, disiplin dan loyalitas dalam menjalankan ajaran agamanya untuk membendung dampak negatif dari modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
3. Membangun rekayasa sosial (social engineering) yang didasarkan pada semangat kearifan lokal dan nilai-nilai spritual sebagai pondasi bagi terciptanya karakter bangsa yang berkeadaban menuju masyarakat madani.
4. Melahirkan generasi yang kuat beriman dan bertaqwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa.
5. Menjadikan program Gerakan Magrib Mengaji sebagai media untuk membangun ikatan yang kuat dalam rangka membentuk keluarga.

Kabupaten Indragiri yang beribukota Kabupaten yaitu Tembilahan dengan 20 kecamatan diantaranya sebagai berikut:

1. Kecamatan Batang Tuaka
2. Kecamatan Concong
3. Kecamatan Enok
4. Kecamatan Gaung
5. Kecamatan Gaung Anak Serka
6. Kecamatan Kateman
7. Kecamatan Kempas
8. Kecamatan Kemuning
9. Kecamatan Keritang
10. Kecamatan Kuala Indragiri
11. Kecamatan Mandah
12. Kecamatan Pelangiran
13. Kecamatan Pulau Burung
14. Kecamatan Reteh
15. Kecamatan Sungai Batang

- 16. Kecamatan Tanah Merah
- 17. Kecamatan Teluk Belengkong
- 18. Kecamatan Tembilahan**
- 19. Kecamatan Tembilahan Hulu
- 20. Kecamatan Tempuling

Dari jumlah kecamatan di atas, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan. Karena masih banyak permasalahan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan. Berikut jumlah rumah ibadah di Kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel I. 1: Jumlah ibadah di kabupaten Indragiri Hilir**

No	Masjid	Mushalla	Langgar	Jumlah
1	757	59	585	1.674

*Sumber : Kantor Urusan Agama*

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang maghrib mengaji di Kecamatan Tembilahan dengan penduduk mayoritas umat muslim tetapi masih ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti akan program inisehingga membuat program Gerakan Masyarakat Mengaji masih kurang berjalan.

Seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 dalam Pasal 6 menjelaskan metode yang dilakukan dalam kegiatan Gemmar Mengaji ini adalah:

1. Membaca Al-Qur'an

2. Menulis huruf Al-Qur'an
3. Menerjemahkan Al-Qur'an
4. Menghafal Al-Qur'an
5. Seni Al-Qur'an
6. Metode pembelajaran lain yang sesuai dengan perkembangan pendidikan Al-Qur'an

Dan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 yaitu sasaran Gemmar Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Dan berikut jumlah masjid yang ada di Kecamatan Tembilahan

**Tabel I. 2: Data Masjid, Mushalla di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Nama Kelurahan di Kecamatan Tembilahan	Masjid	Mushalla	Jumlah Masjid/ Mushalla yang menjalankan Gemmar Mengaji
1	Seberang Tembilahan	7	3	5
2	Sungai Perak	8	2	4
3	Tembilahan Hilir	10	9	8
4	Tembilahan Kota	8	18	12
5	Pekan Arba	3	16	7
6	Sungai Beringin	7	17	14
7	Seberang Tembilahan Barat	3	3	3
8	Seberang Tembilahan Selatan	5	3	4
		<b>51</b>	<b>79</b>	<b>57</b>

<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>57</b>
---------------	------------	-----------

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2020*

Dari tabel di atas terlihat bahwa tempat atau sarana ibadah yang dimiliki oleh Kecamatan Tembilahan cukup banyak dan dapat mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kegiatan Gemmar Mengaji. Akan tetapi fenomena di lapangan Kecamatan Tembilahan masih ada 57 masjid dan mushollah yang tidak melaksanakan kegiatan Gemmar Mengaji. Dari beberapa masjid, mushollah yang tidak melakukan kegiatan Gemmar Mengaji memiliki bermacam alasan tidak melakukan kegiatan tersebut.

**Tabel I. 3: Data Penduduk yang beragama islam**

No	Nama kecamatan	Jumlah penduduk beragama Islam	Jumlah penduduk yang beragama islam yang tidak mengikuti
1.	Kecamatan Batang Tuaka	455	100
2	Kecamatan Keritang	1.035	678
3	Kecamatan Kemuning	1	-
4	Kecamatan Reteh	616	253
5	Kecamatan Sungai batang	176	89
6	Kecamatan Enok	585	120
7	Kecamatan Tanah merah	421	70
8	Kecamatan Kuala indragiri	247	90

9	Kecamatan Congcong	186	78
<b>10</b>	<b>Kecamatan Tembilahan</b>	<b>1.256</b>	<b>450</b>
11	Kecamatan Tembilahan hulu	773	450
12	Kecamatan Tempuling	539	240
13	Kecamatan Kempas	625	500
14	Kecamatan Gaung Anak Serka	388	238
15	Kecamatan Gaung	619	123
16	Kecamatan Mandah	565	169
17	Kecamatan Keteman	603	500
18	Kecamatan Pelangiran	481	371
19	Kecamatan Teluk belengkong	145	45
20	Kecamatan Pulau burung	285	185

*Sumber data : Badan Statistik Indragiri Hilir 2020*

Berdasarkan tabel di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penduduk yang beragama islam di Kecamatan Tembilahan 1.256 dan masih terdapat penduduk yang tidak mengikuti tentang perda gerakan masyarakat maghrib mengajidi Tembilahan. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji juga di harapkan dapat meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat membaca Al-Qur'an menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Al-Qur'an bagi kehidupan manusia sehingga Al-Qur'an tetap dipelajari dan dibaca sekalipun sudah tamat (khatam). Dengan adanya Gerakan Masyarakat Magrib ini dapat meminimalisir pengaruh negative dari perkembangan zaman.



Banyak fenomena yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:

1. Peraturan Daerah Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini kurang berjalan dengan baik dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat.
2. Kurang jelasnya pembiayaan yang dilakukan pemerintah, sehingga perda tersebut tidak berjalan dengan baik.
3. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini masyarakatnya, karena banyak masyarakat yang tidakmengetahui tentang perda gerakan masyarakat maghrib mengaji tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengambil masalah ini karena tidak adanya pelaksanaan oleh masyarakat terhadap peraturan daerah ini. Jika program gerakan masyarakat maghrib mengaji tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat maka program yang dikeluarkan oleh bupati akan sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran dalam pembuatan program tersebut.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis tentukan dilapangan sesuai yang diuraikan di atas, Maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul yaitu: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi Kecamatan Tembilahan)?
2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi Kecamatan Tembilahan)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terjadinya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Secara Teoritis

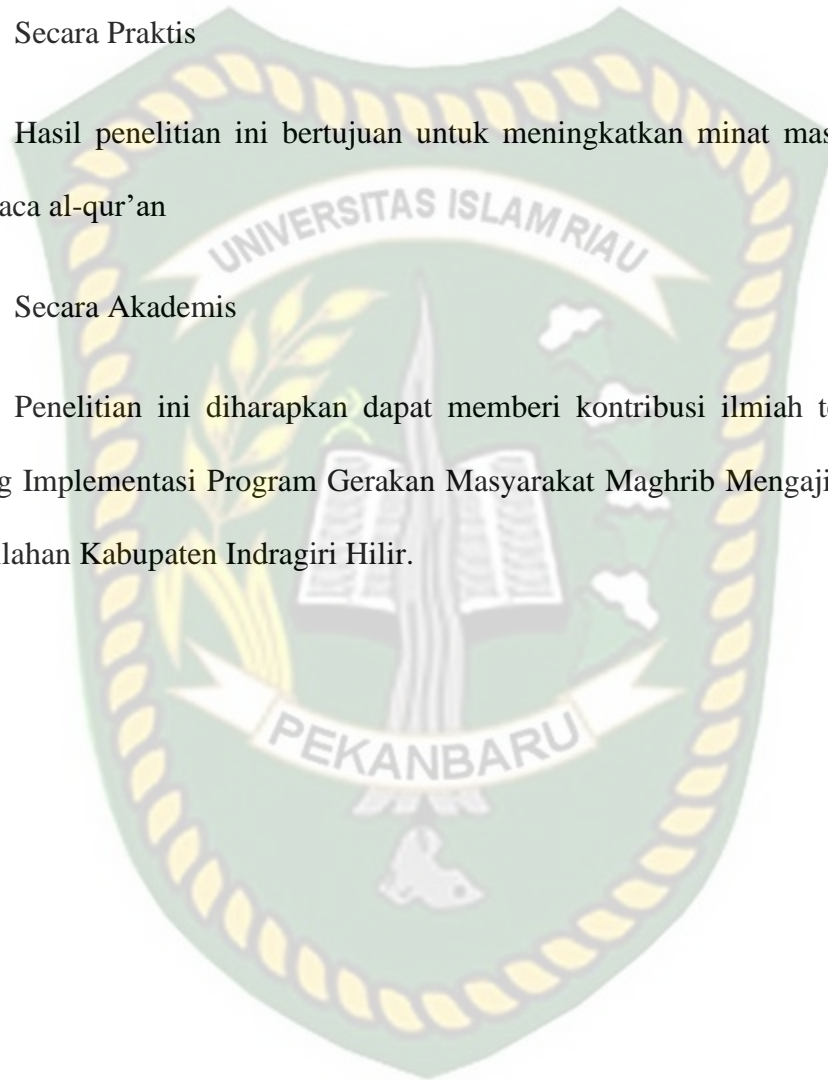
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap bagaimana cara memahami isi al-qur'an di kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membaca al-qur'an

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap kajian tentang Implementasi Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya usulan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topic masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca mengingatkan cakra walanta dari segi tujuan dan hasil penelitian.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005; 20) pemerintahan adalah suatu seni. Di katakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut A. Hamid S. Attamimi (dalam Mahmuzar, 2010;14) pendapat yang memberikan pengertian pemerintahan dalam arti luas didasarkan kepada kegiatan dan fungsi kenegaraan yang meliputi semua fungsi organ negara. Dalam organisasi negara

terdapat beberapa jabatan. Jabatan-jabatan tersebut adalah alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Untuk menjalankan jabatan-jabatan tersebut harus adapemangku jabatan yang lazim disebut dengan pejabat(penjabat).

Menurut Ndraha (2015;6)Pemerintah adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan publik dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi setiap orang yang melalui hubungan pemerintahan, sehinggasetiapanggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negaraasing atau siapa saja yang suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, pemerintah wajib melayankannya.

Menurut Syafiie (2005;20) pemerintahan adalah suatu seni.Di katakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

## **2. Konsep Pemerintahan**

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “ perintah” yang kemudian mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ

elite yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara serta mendapatkan akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi (Syafiie, 2003;133). Secara lebih rinci dijelaskan bahwa dalam kata dasar perintah paling sedikit ada empat unsur sebagai berikut:

- 1) Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang di perintah disebut rakyat.
- 2) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- 3) Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- 4) Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legilasi, eksekusi, yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah (Syafiie, 2013:36).

Menurut Labolo (2006;23) pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula dengan aktivitas dalam berbagai konteks

kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers).

Menurut Ndraha (2015; 81) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Syafiie (2011:10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

Menurut Edwar III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2001:190) mengemukakan kebijakan publik sebagai : *“What government say and do, or not to do it is the goals or purpose of government program”* ( apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah). Pendapat Edward III dan Sharkansky(dalam Widodo, 2001:190) juga mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan

adalah formalitas dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah (Sumaryadi. 2013:83).

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh perilaku guna memecahkan masalah tertentu , Anderson (dalam Widodo,2001: 190).Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Widodo, 2001 : 190) yang berjudul good government telah dari dimensi: Akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Elemen tersebut antara lain mencakup:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan penjabat-penjabat pemerintahan.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud dilakukan.



- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintahan mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari istilah kebijakan sering kali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a) Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di

masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.

Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2005) menyatakan bahwa:

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakanyang sengaja dilakukan secara sadardan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang

mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

#### 4. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak. Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik (Sumaryadi, 2013:85). Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008:139) adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Sumaryadi (2013:83) adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III (dalam Agustino,

2008:149) dimana ada 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

### 1) **Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (ataudikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disalahgunakan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan

tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksanaannya membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk di terapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan (Agustino, 2008;150).

## 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, indicator sumber daya menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yakni:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil (Agustino, 2008;151).

### 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tentunya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi menurut George C. Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan (Agustino, 2008;152).

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu tatanan kerja. Menurut Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan



- e. Siapa pelaksana program

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga penguasa
- c. Keputusan dan daya tanggap

Implementasi dapat di konseptualkan sebagai suatu proses, hasil dan akibat sebagai akibat. Sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Maksudnya, untuk menempatkan suatu keputusan otoritatif dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

#### **5) Konsep Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah menjalankan tugas dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

- b. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

Menurut Kaloh (2007:165) Dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Maksud pembentukan daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah digambarkan dalam bagan dibawah ini :



Menurut Widjaja (1998:40) pemerintah daerah adalah Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah merupakan bentuk atau bangunan ini menjamin adanya kemitraan (kerjasama) yang serasi antara kedua unsur pemerintahan daerah dan pembagian tugas dan kedudukan yang sama tinggi. Kepala daerah terutama memimpin bidang eksekutif sedang dewan perwakilan rakyat daerah terutama memimpin bidang legislatif.

#### **6) Konsep Gemmar Mengaji**

Gerakan Masyarakat Magrib mengaji atau yang lebih dikenal dengan Gemar mengaji merupakan program nasional Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirancang disetiap Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Gerakan Masyarakat Maghrib mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Alquran setelah shalat Maghrib di kalangan masyarakat. Program GEMMAR Mengaji yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah berjalan sejak tahun 2011.

Membaca Al-Qur'an atau mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini mengaji sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih asik di depan televisi dari pada mengaji. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat Maghrib di kalangan masyarakat. Mempelajari Alquran merupakan

suatu anjuran dalam agama Islam. Karena Alquran adalah sebagai pedoman hidup umat manusia yang harus dipelajari. Al-Qur'an adalah bacaan kaum muslimin.

Sedangkan Urgensi Gemmar Mengaji berdasarkan Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ( Gemmar Mengaji ) Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Gerakan mengaji pada waktu maghrib adalah langkah yang efektif untuk membendung budaya global dan pengaruh negative tayangan TV. Gerakan Maghrib Mengaji merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan local yang selama ini hampir dilupakan. Misalnya sholat berjamaah di surau, langgar, mushollah, masjid dan lain-lain serta budaya mengaji setelah ashar dan maghrib.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji / GEMMAR Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an pada waktu maghrib di kalangan masyarakat. Kemudian kegiatan GEMMAR MENGAJI adalah mengaktifkan umat islam mempelajari dan membaca Al-Qur'an pada waktu maghrib sampai sebelum isya yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memiliki karakter keagamaan yang kuat, yang menjadi sasaran yaitu seluruh masyarakat yang beragama islam, baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

GEMMAR Mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat Maghrib dikalangan masyarakat. Membaca Al-Qur'an atau mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini mengaji sudah mulai ditinggalkan. Masjid-masjid kosong, tak ada lagi aktifitas pengajian. Umat lebih asyik di depan televisi dari pada mengaji.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 1: Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ardi	Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Dzuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian	Sama-sama meneliti tentang Implementasi Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah	Lokasi penelitian dan peraturan dalam penelitian berbeda
2	Resti Fina Utami	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti peraturan Daerah Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji	Metode penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif
3	Nusfi Wandika	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Studi di Kecamatan Keritang	Sama-sama Menggunakan Teori Edward III	Lokasi penelitian terdahulu meneliti di kecamatan keritang

*Sumber data: Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa peneliti terdahulu memiliki perbedaan yakni peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan lokasi peneliti

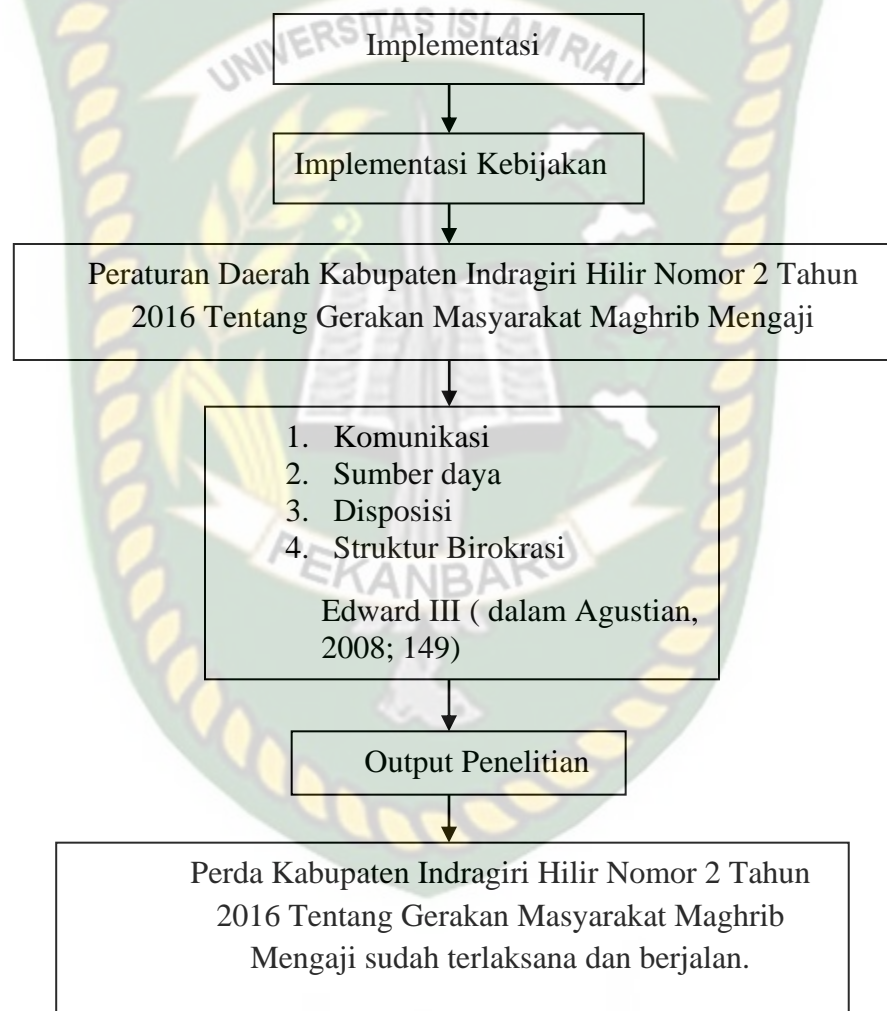
terdahulu di pangaraian, kampar dan kecamatan keritang sedang penulis melakukan penelitian ini dikecamatan tembilahan dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliatin ini sama dengan penelitian sebelumnya yang sama-sama meneliti dia Tembilahan tetapi perbedaanya disini ialah peneliti terdahulu meneliti di Kecamatan Keritang dan fokus peneliti tersebut terletak di desa yang berada di Kecamatan keritang, sedangkan penulis meneliti di Tembilahan fokus di Kecamatan Tembilahan menggunakan Metode kualitatif.



### C. Kerangka Pikir

Penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Edward III ( dalam Agustian, 2008; 149) mengenai 4 indikator : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

**Gambar I. 1: Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)**



*Sumber: Modifikasi Dari Sejumlah Dasar Teoritis, Tahun 2021*

#### D. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional atau (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan ini, maka dengan ini diberikan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah sebagai sebuah proses mengubah sebuah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan menjalankan cara menjalankan perubahan tersebut.
- b. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji adalah merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hampir dilupakan.
- c. Komunikasi adalah Komunikasi penyampaian informasi bahwa pada suatu organisasi atau organisasi yang satu keorganisasi yang lain/
- d. Sumber daya, yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang dimaksud adalah dana dan manusia.
- e. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan disampaikan.
- f. Struktur birokrasi, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengajar (control) hirarki terhadap keputusan.



### E. Operasional Variabel

**Tabel II. 2: Operasional variable penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub.Indikator
Kebijakan adalah aktifitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses (Dun dalam Nugroho, 2004;131)	Implementasi kebijakan	1. Komunikasi	1. Pemberian Informasi Tentang Perda Nomor 2 Tahun 2016. 2. Pemberian Informasi tentang Gemmar Mengaji
		2. Sumber daya	1. Jumlah pengajar disetiap masjid. 2. Ketersedian tempat bagi tenaga pengajar Gemmar mengaji
		3. Disposisi	1. Konsistensi dengan peraturan 2. Bertanggung jawab dengan aturan
		4. Struktur Birokrasi	1. Koordinasi dengan pihak lain 2. Adanya kejelasan tugas dan fungsi

Sumber : Modifikasi penulis 2021

## **BAB III**

### **TIPE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (dalam Patilima, 2013: 3) metode kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Dalam hal ini Creswell (dalam Herdiansyah, 2014:08) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam pengaturan (setting) yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa sesungguhnya dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Tidak mungkin manusia dapat dilepaskan dari konteks sosial ataupun lingkungan sosial beserta budaya tempat ia berada. Oleh karena itu, apapun sikap yang dimunculkan beserta sudut pandang seorang individu sangat di pengaruhi oleh latar sosial, kondisi

sosial, dan budaya nya masing-masing. Dalam sudut pandang kualitatif teori adalah hasil penelitian, peneliti berharap memperoleh atau menemukan teori berbentuk informasi yang dibawa oleh informan (Effendy, 2009; 73). Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan 2013; 80).

Kemudian Bugin (2007:5) metode kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kristime yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme penelitian yang menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan kant bahwa kristimr adalah sebuah kerja rasio dan empiris seseorang, akan sangat membantu penelitian kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kristisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, tentunya dalam penelitian ini analisa terhadap permasalahan yang dihadapi tentang Implementasi Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tembilahan, alasan penulis melakukan penelitian di kecamatan Tembilahan karena berdasarkan hasil observasi kurangnya implementasi perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di kecamatan Tembilahan yang tidak sesuai dengan visi dan misi kota tembilahan untuk mewujudkan kota Tembilahan sebagai kota “Ibadah”.

## C. Informan

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yaitu salah satu tipe penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan informan sebagai sumber datanya dan wawancara sebagai prosesnya. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76).

**Tabel III. 1: Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Kasubang Kesra	Key Informan
2	Kepala TU Kemenag	Informan
3	Kelurahan	Informan
4	Tenaga pengajar	Informan
5	Tokoh Agama	Informan
6	Masyarakat	Informan

*Sumber: Olahan Peneliti 2021*

Bedasarkan tabel diatas peneliti menjumpai informan secara informal ada didatangi dikantor dan dirumah. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan tidak di dasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam wawancara peneliti ini dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Kepala Kasubag Kesra

Bapak Syukur selaku kepala sub bagian kesra sebagai keyinforman untuk mengetahui tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kepala TU Kemenag

Bapak Drs. H. Idrus, M. Pd. I selaku kepala TU Kemenag sebagai informan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

3. Kelurahan

Bapak Zulkifli selaku kelurahan Tembilahan kenapa peneliti menjadikannya informan karena untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

#### 4. Tenaga pengajar

Bapak Wahyudi selaku tenaga pengajar Tembilahan peneliti menjadikan nya informan untuk mengetahui apakah Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak di Kecamatan Tembilahan.

#### 5. Tokoh Agama

Ustadz Abidin selaku tokoh agama peneliti menjadikan nya informan untuk mengetahui apakah Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan ini berjalan dengan lancar.

#### 6. Masyarakat

Ibu Ayu selaku masyarakat peneliti menjadikan nya informan untuk mengetahui apa dampak dari Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data primer

Adalah data yang didapat dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan)

yaitu hasil wawancara dengan responden menyangkut indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Undang-Undang yang Menyangkut dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan)

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi menurut Patton (2009:1) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literature dan lainnya.

Kemudian Herdiansyah (2014:131) menyatakan bahwa observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Inti dari observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dari adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

## 2. Wawancara

Patton (2009:1), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dari definisi di atas dapat di lihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak dilakukan. Wawancara bukan hanya di pahami sebagai pembicaraan



antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

### 3. Dokumentasi

Menurut Patton (2009:1), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

Sedangkan Herdiansyah (2014:143) Menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Kemudian Bungin (2007:124) menyatakan bahwa dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, penelitian ini, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan.lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif denga pendekatan kualitatif.Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan denga fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis. (Burhan Bungin, 2007:149).

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III. 2: Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)**

Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																							
	November 2020				Desember 2020				Januari-februari				Maret-April				Mei				Juni			
Penyusunan UP	■	■	■	■																				
Seminar UP					■	■	■	■																
Revisi UP									■	■	■	■												
Survey Lapangan													■	■	■	■								
Analisis Data																	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
Perbaikan Bab Per Bab																								■
Ujian skripsi																								■
Perbaikan skripsi																								■
Penggandaan skripsi																								■

Sumber: Olahan Penelitian 2021

## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota di Tembilahan adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No.49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “ NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawadan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan di pengaruhi oleh pasang surut.

Secara geografis, daerah ini berada pada posisi :

1. 0 36'                      Lintang Utara
2. 1 07'                      Lintang Selatan

3. 104 10' Bujur Timur
4. 102 30' Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Porovinsi Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

### 1. Iklim

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada daratan rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapansungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas gugusan

pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau ruku, Pulau Mas, PulauNyiur dan pula-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Btang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/TerusanSungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman. Sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah TanjungDatuk dan Tanjung Bakung.

## **2. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 berjumlah 731.396 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 77.135 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.892 jiwa. Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 375 236 jiwa penduduk perempuan berjumlah 356 160 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,36. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 60 jiwa per km<sup>2</sup> Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 10,55 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang dengan tingkat kepadatan 1,76 jiwa per km<sup>2</sup>.

### 3. Pendidikan

Pada tahun 2019 terdapat sarana pendidikan, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV. 1: Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2019	521
2	Madrasah Ibtida'iyah	2019	184
3	Sekolah Menengah Pertama	2019	137
4	Madrasah Tsanawiyah	2019	141
5	Sekolah Menengah Atas	2019	45
6	Sekolah Menengah Kejuruan	2019	19
7	Madrasah Aliyah	2019	55
<b>Jumlah</b>			<b>1.102</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2019*

### 4. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pada tahun 2018 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fasilitas 4 Rumah Sakit, 27 Puskesmas, untuk selengkapnya dapat melihat. Angka harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir pada

tahun 2018 adalah 71,95 tahun mengalami peningkatan 2016 yang sebesar 71,88. Angka tersebut diatas angka harapan hidup Provinsi Riau yaitu 71,73. Kabupaten Indragiri Hilir berada diperingkat ketiga dalam angka harapan hidup dibawah Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Meningkatnya angka harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk Agama Islam. Hal ini dapat digambarkan dari banyaknya jumlah mesjid dan surau/mushalla sebagai tempat ibadah umat islam. Tempat ibadah sangat penting selain digunakan sebagai tempat ibadah, biasanya juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir jumlah sarana ibadah dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV. 2: Tempat Sarana Ibadah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Sarana Ibadah	Tahun	Jumlah
1	Masjid	2019	854
2	Surau	2019	581
3	Mushalla	2019	581
4	Gereja	2019	1
5	Kelenteng	2019	3



6	Vihara	2019	6
<b>Jumlah</b>			<b>2026</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2019*

Dari table diatas dapatdilihat bahwa jumlah sarana ibadah umat muslim lebih banyak dan jelas mayoritas masyarakat Indragiri Hilir adalah agama islam.

### **B. Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197.37 km<sup>2</sup>atau 19.737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
- d. SebelahTimur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

Kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa melayu, bugis, jawa, minang, banjar, batak, dan merekahidupberdampingan dengan rukun damai saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mayoritasnya penduduk Kecamatan Tembilahan mempunyai mata pencaharian dengan berkebun dan nelayan bagi penduduk pendatang.

Terdapat jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 77 135 jiwa yang terdiri dari populasi laki-laki 38 914 jiwa dan populasi perempuan 38 221 jiwa.

## 1. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan

### a. Visi

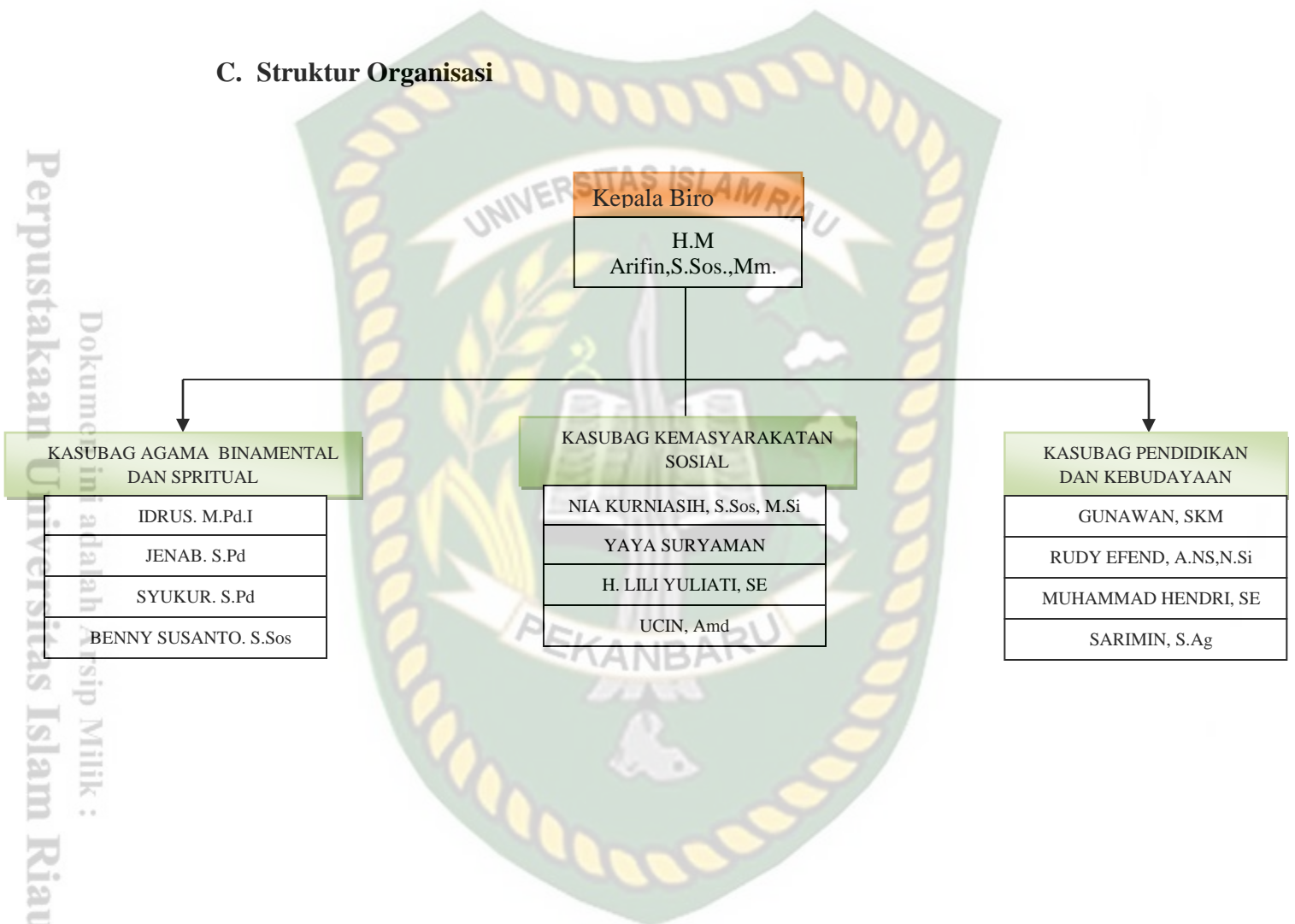
Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “*Ibadah*” dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat peripurna
- 3) Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ
- 4) Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya gotong royong
- 5) Menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah
- 6) Fungsi kawasan yang saling mendukung
- 7) Membangkitkan citra kota tepi sungai
- 8) Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya

- 9) Menjadikan Tmbilahan Kota “*Water Front City*” dengan harapan menjadi “*Land Mark*” Kota Tembilihan dan pada gilirannya akan dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan daerah *hinterlandnya*

### C. Struktur Organisasi



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengamati kebijakan pemerintah terhadap mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan), dimana penelitian ini mengambil fokus kepada 4 (empat) indicator variable yang dapat menerangkan bagaimana Implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan), indicator tersebut meliputi, Komunikasi (dimana dalam mengamati proses mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut serta garis koordinasi dalam bentuk kerjasama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut), Sumber daya (berkaitan dengan sikap atau respon dari pelaksana kebijakan maupun yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut), Disposisi (berkaitan dengan sikap atau respon dari pelaksana kebijakan maupun dari yang menerima kebijakan tersebut), dan Struktur Birokrasi (berkaitan dengan badan atau lembaga yang berkaitan dengan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dalam bentuk pembagian tugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan berkerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### A. Identitas Responden

Berikut ini penulis sajikan identifikasi responden meliputi jumlah responden, tingkat umur responden, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

#### 1. Tingkat Umur

Untuk menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V. 1: Jumlah responden berdasarkan umur tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).**

No	Umur	Jumlah
1	20-30 umur	3
2	31-40 umur	7
3	41-50 umur	10
	<b>Total</b>	<b>20</b>

*Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2021*

Dari tabel V.I dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak berusia 41 - 50 tahun yakni 10 orang sedangkan umur responden 31 – 40 tahun yakni sebanyak 7 orang , sedangkan umur 20 – 30 tahun 3 orang .Dilihat dari umur responden dapat di kategorikan cukup produktif dalam pengumpulan data responden.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam segala bidang terutama alam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi ilmu dan skill yang dimiliki pegawai, sehingga pada gilirannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pegawai mendapatkan hasil yang optimal. Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini:

**Tabel V. 2: Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenjang Pendidikan Formal tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SMA	14
2	Lulusan Strata Satu (S1)	4
3	Lulusan Magister (S2)	2
	<b>Total</b>	<b>20</b>

*Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2021*

Dari tabel V.2 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak ada di tamatan SMA, yaitu 14 orang sedangkan tamatan S1 sebanyak 5 orang dan tamatan S2 sebanyak 1 orang.

### 3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melakukan tugas, sedangkan skil atau keahlian merupakan faktor penentu seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan. Berikut jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini:

**Tabel V. 3: Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenis Kelamin tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan).**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	12
	<b>Total</b>	<b>20</b>

*Sumber: Hasil penelitian Lapangan, 2021*

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden didominasi semuanya oleh perempuan yaitu berjumlah 12 orang sedangkan laki-laki berjumlah 8 orang.

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan)**

Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mula berkembangnya Islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid, dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai shalat Ashar maupun ba'da Maghrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tak ubahnya menjadi lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik.

Program Maghrib Mengaji adalah langkah efektif untuk membendung budaya global dan pengaruh negatif tayangan TV. Gerakan Maghrib Mengaji merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hampir dilupakan. Misalnya, shalat berjama'ah di masjid, di mushola/surau, langgar dan budaya mengaji setelah shalat maghrib.

Program Maghrib Mengaji menjadi sangat penting, mengingat pelajaran agama di sekolah sangat terbatas, termasuk porsi pelajaran mengaji Al-Qur'an. Orang tua yang sadar akan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran sejak dini, tentu akan memasukkan putera-putrinya ke masjid atau mushalla ataupun sejenisnya pada sore atau malam harinya, sebagainya pelajaran tambahan.

Idealnya ke depan, melalui PROGRAM MAGHRIB MENGAJI Generasi Muslim di Indragiri Hilir perlu diingatkan dan ditingkatkan dalam mempelajari al-



qur'an: yaitu bukan hanya sekedar mengejar target lancar membaca al-qur'an, tapi ditingkatkan kearah substansi pemahaman al-qur'an yang baik dan benar. Hal ini dirasa penting, mengingat komitmen untuk merealisasikan ajaran Al-Qur'an dalam perilaku keseharian sulit terwujud.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan) penulis menggunakan 4 indikator yang digunakan yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan, atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat mengenai kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diimplementasikan serta diinformasikan dengan jelas. Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui "Komunikasi" dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Studi di Kecamatan Tembilahan) adalah:

- a. Adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai perda gerakan masyarakat maghrib mengaji
- b. Adanya komunikasi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syukur S.Pd kepala Sub Bidang Kesra pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kesra tentang “Apakah Bapak/Ibu sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji kepada masyarakat di Kecamatan Tembilahan?”berikut jawabannya:

*“Gerakan magrib mengaji yang ada di tembilahan sudah disosialisaikan baik dalam lingkup tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sosialisasi itu sendiri berada dalam kategori surau ataupun mesjid aktif yang ada di tembilahan. Tembilahan terdiri dari 20 kecamatan dimana di tiap kecamatan sudah di lakukan sosialisasi maghrib mengaji oleh pemerintah kecamatan dan hasilnya di terima dengan baik oleh masyarakat.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa gerakan mengaji ini telah disosialisasikan dengan baik tokoh agama maupun masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Idrus, M.Pd. I kepala TU kemenag pada tanggal 20 Januari 2021 jam 09:00-10:00 di Kantor Kementerian Agama tentang “Bagaimanakah bentuk mensosialisasikan perda tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir?”berikut jawabannya:

*“Sosialisasi diberikan secara berjenjang, Bupati memberikan kepercayaan kepada bidang bagian kesra untuk menjalankan program gemmar mengaji ini. Kemudian bagian kesra memanggil pihak kecamatan dan bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk mensoialisasikan gerakan maghrib mengaji dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam gedung kecamatan (aula kecamatan) masing-masing tempat untuk di berikan pembinaan. Adapun yang*

*terhimpun dalam kategori masyarakat gerakan maghrib mengaji ini adalah masyarakat yang aktif mengajar mengaji seperti tokoh agama, ustadz, ustadzah, hafiz dan hafidzah. Sehingga melalui merekalah program magrib mengaji sampai pada masyarakat luas. Selain mensosialisasikan perdanya, bagian kesra juga mensosialisasikan metode apa yang akan diberikan kepada anak dalam program gemmar magrib mengaji ini.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa sosialisai yang di lakukan pemerintah daerah dengan cara Bupati memberikan kepercayaan kepada bidang bagian kesra untuk menjalankan program gemmar mengaji ini. Kemudian bagian kesra memanggil pihak kecamatan dan bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk mensosialisasikan gerakan maghrib mengaji dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam gedung kecamatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai kelurahan pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 14:00-15:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilihan tentang “Bagaimana proses pembagian tugas dalam pembinaan terhadap tenaga pengajar gemmar mengaji?” berikut jawabannya:

*“Proses pembagian tugas dalam pembinaan tenaga pengajar gemmar mengaji ini dibagi mejadi 2 sub bagian yaitu bagian pengajar dan bagian pengawasan.*

*Pembinaan bagian pengajaran ini diberikan secara berjenjang, dimana bagian kesra akan mensosialisasikan dengan pihak kecamatan, kemudian pihak kecamatan akan melakukan pembinaan terhadap tenaga pengajar. Dalam kategori ini adalah tokoh agama yang aktif mengajar mengaji. Pembinaan dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri, dimulai dari aktif atau tidak aktifnya proses gemmar mengaji berlangsung hingga jumlah santrinya. Kemudian hasil dari pembinaan akan dilaporkan kembali kepada pihak kesra untuk dilakukan pembinaan ulang tiap triwulan pertahunnya, sesuai dengan rekomendasi dari kepala desa masing-masing kecamatan.*

*Kemudian untuk pembinaan bagian pengawasan selain diawasi oleh pihak kesra sendri juga di bantu oleh pihak kantor kementrian agama dalam proses*

*pengawasannya. Pihak kemenag mengawasi proses berjalannya program gemmar mengaji, kemudian juga turut membantu dalam proses pembinaan ulang apabila di temukan kendala ataupun masalah dalam proses berlangsungnya kegiatan.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam bentuk pembagian tugas pembinaan dengan membagi mejadi 2 sub bagian yaitu bagian pengajar dan bagian pengawasan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 januari 2021 jam 20:00-21:00 di Ruang Kerja wib tentang “Bagaimanakah bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang program Gerakan Masyarakat Mengaji ini?” berikut jawabannya:

*“Ya bentuk sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat di kantor Kelurahan, tidak semua masyarakat tetapi beberapa saja seperti tokoh agama, ustadz, ustadzah, hafiz dan hafidzah setelah itu baru di beritau kepada masyarakat lewat mesjid-mesjid atau mushola”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa bentuk sosialisasi kepada masyarakat diberitau lewat mesjid-mesjid dan mushola.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yakni ibu Ayu pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di mesjid Al-Huda tentang “apakah masyarakat disini sudah melaksanakan program ini?” berikut jawabannya:

*“Sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Indragiri hilir nomor 2 tahun 2016 tentang gerakan maghrib mengaji itu sudah kami laksanakan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, tapi ya tidak semua masyarakat yang melaksanakan program ini di mesjid”*

Berdasarkan hasil peneliti di atas peneliti dapat menganalisis bahwa program ini sudah di jalankan sejak tahun 2016 lalu tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengikuti program ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-Huda tentang “Saat Perda ini keluar apakah masyarakat langsung menerima tentang program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini?” berikut jawabannya:

*“Tentu tidak, tidak semua masyarakat mengikuti pada saat itu karena kebanyakan masyarakat setelah selesai sholat mereka langsung pulang kerumah masing-masing.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa saat pertama kali perda ini keluar masyarakat tidak semua mengikuti.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka hasil observasi sama dengan analisis. peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjemput salah satu masyarakat seperti ustadz dan ustadzah sebagai perwakilan untuk memberitahukan adanya program gerakan masyarakat mengaji. Suatu proses penyampaian informasi yang sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu program agar masyarakat mengerti akan program yang dibuat apabila terjadi miskomunikasi maka program atau kegiatan yang akan di jalankan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah membuat Program Gerakan magrib mengaji. Dalam wawancara penulis dengan kepala Sub Bidang Kesra pada tanggal

19 Januari 2021 program yang ada di tembilahan sudah disosialisaikan baik dalam lingkup tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Sosialisasi itu sendiri berada dalam kategori surau ataupun mesjid aktif yang ada di tembilahan. Dimana Tembilahan sendiri terdiri dari 20 kecamatan dimana di tiap kecamatan sudah dilakukan sosialisasi maghrib mengaji oleh pemerintah kecamatan dan hasilnya di terima dengan baik oleh masyarakat. benyuk sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang atau bertahap, bupati memberikan kepercayaannya terhadap bidang bagian kesra untuk menjalankan program gerakan masyarakat mengaji ini. Kesra berkerja sama dengan kecamatan untuk mensosialisasikan program ini.

Bentuk pembagian tugas ialah dimana kesra memberi pengajaran secara bertahap, kesra akan mensosialisasikan dengan pihak kecamatan, kemudian pihak kecamatan akan melakukan pembinaan terhadap tenaga pengajar. Dalam kategori ini adalah tokoh agama yang aktif mengajar mengaji. Kemudian untuk pembinaan bagian pengawasan selain diawasi oleh pihak kesra sendiri juga di bantu oleh pihak kantor kementerian agama dalam proses pengawasannya. Pihak kemenag mengawasi proses berjalannya program gemmar mengaji, kemudian juga turut membantu dalam proses pembinaan ulang apabila di temukan kendala ataupun masalah dalam proses berlangsungnya kegiatan.

Gerakan masyarakat megaji ini menghidupkan kembali tradisi membaca Alquran setiap selesai shalat Magrib di seluruh masjid yang ada di wilayah Kota tembilahan. Membentuk sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-

nilai islam dan dapat melahirkan generasi yang kuat beriman dan bertaqwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat dengan adanya gerakan ini masyarakat dapat memanfaatkan waktu antara Maghrib dan Isya dengan efektif untuk beribadah kepada Allah dan memperdalam wawasan keagamaannya dan tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan umat Islam untuk membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti akan program ini banyak masyarakat yang langsung pulang kerumah masing-masing setelah sholat maghrib dan masih banyaknya mesjid yang tidak melakukan kegiatan masgrib mengaji ini di mesjid yang disebabkan sosialisasi yang kurang sehingga membuat perda tentang gerakan masyarakat mengaji ini pengimplementasinya masih kurang.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya sumber penggerak dan pelaksana, sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Idrus, M.Pd. I kepala TUKemenag pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10:00-11:000 di Kantor

Kementerian Agama tentang “Bagaimana proses penunjukan tenaga pengajar GEMMAR MENGAJI (Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji) ?” berikut jawabannya:

*“Perekrutan dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari pihak kepala desa. Kemudian di setiap desa itu sendiri memiliki satu mesjid terpilih, setelahnya dilakukan lah proses pemilihan tokoh-tokoh agama yang terpercaya di tiap kecamatan, untuk selanjutnya di sampaikan ke bagian kesra. Jadi perekrutan melalui des atau prangkat desa ( kepala desa).”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwa penunjukan tenaga pengajar dengan cara pemilihan tokoh-tokoh agama yang terpercaya di tiap kecamatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesrapada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wibdi Kantor Kesra tentang “Bagaimanakah bentuk pembiayaan dan bentuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Gemmar Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir?” berikut jawabannya:

*“Pembiayaan yang diberikan kepada selain kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu, beban anggaran yang di berikan adalah beban anggaran dari apbd desa, sedangkan kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu di bayarkan oleh kesra, terkhusus kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu pengawasannya di perketat dikarenakan menjadi ikon percontohan bagi kecamatan lainnya. Besaran insentif yang diberikan kepada tokoh agama yang berperan aktif dalam program gemma rmengaji ini dalah Rp. 300.000 Rupiah perbiulannya, diberikan rapel tiap 4 -5 bulan sekali. Untuk sarana pelaksanaan program maghrib mengaji ini, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaannya, antarlain :*

- a. Pihak Kesra telah mencetak buku panduan metoda pembelajaran,
- b. Pihak Pemerintah membantu pengadaan Al-Quran dan Rehal
- c. Pihak Pengurus mesjid/ surau turut membantu pengadaan Rehal di mesjid ataupun surau tertunjuk.



- d. *Pihak Masyarakat sebagai donatur baik berupa uang maupun sarana pembelajaran.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis pembiayaan untuk tenaga pengajar yakni di bayarkan oleh kesra, terkhusus kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu pengawasannya di perketat dikarenakan menjadi ikon percontohan bagi kecamatan lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 Januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja tentang “Bagaimanakah bentuk pembiayaan untuk tenaga pengajar gemmar mengaji?” berikut jawabannya:

*“ gaji yang diberikan pemerintah yaitu Rp. 300.000 Rupiah perbulanya tapi kadang telat dalam pemberian gaji kadang mau dalam 2 bulan itu tidak diberi upah dan masih kurangnya tenaga pengajar.”*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai Kelurahan Tembilahan pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan tentang “ Apakah semua Mesjid dan Mushola yang ada di Kecamatan tembilahan sudah melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini?” berikut jawabannya:

*“Semua mesjid dan mushola melaksanakan, kalo semua mesjid saya pastikan melaksanakan. Tapi kalo di mushola mungkin tidak semua melaksanakan karena kebanyakan yang menjalankan program ini di mesjid”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa semua mesjid yang berada di kecamatan tembilahan sudah melaksanakan program

gerakan masyarakat mengaji ini sedangka mushola tidak semua yang melaksanakan program gerakan masyarakat mengaji ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-Hudatentang “ bagaimana sikap masyarakat yang ada di Kecamatan tembilahan tentang program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini?” berikut jawabannya:

*“Melihat di masyarakat itu timbul ada semacam ini yaa perubahan struktur tingkat kepedulian kepada anak-anak mengenai agama itu semakin baik karena ada fasilitas maghrib mengaji. Kalau dulu tak ada sebutan maghrib mengaji kalau ngaji-ngajilah kalau sekarang tidakkan, sekarang mangapa karena ada maghrib mengaji dan ini dituangkan dalam suatu perda kemudian ada anjuran dari pemerintah menindak lanjuti peraturan ini.”*

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menganalisis bahwa sikap masyarakat menjadi lebih peduli kepada anak-anak tentang agama .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yakni ibu ayu pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda tentang “apakah menurut ibuk sumber daya pemerintah dalam melaksanakan program ini sudah cukup ?” berikut jawabannya:

*“Dari segi sumber daya yang ada saat ini di kategorikan cukup sudah cukup memadai dalam terutama dari tenaga pengajarnya”*

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menganalisis bahwa sumber daya di sini sudah cukup baik terutama di dari tenaga pengajarnya.

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam pemberian gaji untuk tenaga pengajar yaitu sebesar 300.000 rupiah setiap bulan nya

tapi terkadang pemerintah terlambat memberikan upah untuk tenaga pengajar. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka hasil observasi dan analisis sama. peneliti dapat menyimpulkan bahwa di sumber daya ini yang paling berpengaruh dalam mewujudkan program gerakan masyarakat maghrib mengaji yaitu adalah tenaga pengajar. Sumber daya sangat di butuhkan dalam menjalankan program ini yaitu seperti tenaga pengajar dan masyarakat sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Penunjukan tenaga pengajar dengan cara pemilihan tokoh-tokoh agama yang terpercaya di tiap kecamatan. Untuk sarana pelaksanaan program maghrib mengaji ini, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaannya, antarlain : Pihak Kesra telah mencetak buku panduan metoda pembelajaran, Pihak Pemerintah membantu pengadaan Al-Quran dan Rehal Pihak Pengurus mesjid/ surau turut membantu pengadaan Rehal di mesjid ataupun surau tertunjuk. Pihak Masyarakat sebagai donatur baik berupa uang maurun sarana pembelajaran.

Setelah keluarnya Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini antusias masyarakat dalam menanggapi perda ini sangat baik tingkat kepedulian kepada anak-anak mengenai agama itu semakin baik karena ada fasilitas maghrib mengaji, dengan adanya perda ini membuat dan mengubah sikap moral masyarakat terutama masyarakat muslim dengan setelah sholat langsung mengaji di mesjid bersama-sama.

Sumber daya ini bahwa merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan) yang dimiliki masing-masing individu manusia. Daya pikir merupakan kecerdasan (modal dasar) yang dibawa oleh manusia sejak lahir membuat manusia mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara fisik atau daya fisik manusia, di mana dengan menggunakan akal budinya manusia mampu mencari cara atau jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang tidak mampu dilakukan oleh daya fisik manusia dengan berbagai inovasi dan ide yang diolah oleh daya pikir manusia.

Di temukan juga mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini adanya mesjid maupun mushola yang tidak menjalankan perda ini, tetapi tidak semua mesjid ada sebagian mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini, kebanyakan di mushola yang tidak menjalankan Perda ini karena tempat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini.

Bentuk pembiayaan : untuk tenaga pengajar yakni di bayarkan oleh kesrayaitu senilai Rp.300.000.00. jika dihitung untuk per 6 bulan sekali maka hasilnya untuk setiap tenaga pengajar memperoleh jumlah dengan total Rp.1.800.000.00. terkhusus kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu pengawasannya di perketat dikarenakan menjadi ikon percontohan bagi kecamatan lainnya. Sumber daya untuk menjalankan program gerakan masyarakat mengaji ini sudah cukup baik, akan tetapi masih adanya

tenaga pengajar yang tidak mendapatkan upah insentif yang tidak sesuai dengan perda Gemmar Mengaji dan terkadang upah yang di berikan kan yang seaturannya mendakan tiap bulan tetapi tidak di beri oleh pemerintah.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tentunya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa. Dalam tahap disposisi dijelaskan bahwa pemerintah kurang baik dalam melakukan interaksi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian disposisi diartikan sebagai sikap atau perspektif implementator dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Idrus, M.Pd. I kepala TU Kemenag pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10:00-11:000 di Kantor Kementerian Agama tentang “ Apa upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam menunjang kegiatan Maghrib Mengaji ?” berikut jawabannya:

*“Upaya dan langkah kongkrit Kementerian Agama dalam menunjang kegiatan maghrib mengaji antara lain adalah pertama memberikan wewenang kepada para Kepala KUA dalam Kabupaten Inhil untuk mengevaluasi serta memantau kegiatan maghrib mengaji di kecamatan dan desa serta memberikan laporan tertulis kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Inhil, kedua bersama dengan pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhil menyusun dan pengesahan Rancangan Perda Maghrib Mengaji dalam hal ini Kementerian Agama merupakan pelaksana dan pengarah kegiatan pada pelaksanaan maghrib mengaji serta menyusun*

*kurikulum maghrib mengaji tersebut, tiga memberikan dana pembinaan untuk TPQ sebagai dana pembinaan terhadap penyelenggara Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut."*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa kementerian agama ikut dalam mensukseskan program ini dengan cara memberikan wewenang kepada para Kepala KUA dalam Kabupaten Inhil untuk mengevaluasi serta memantau kegiatan maghrib mengaji di kecamatan dan desa serta memberikan laporan tertulis kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Inhil.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesrapada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra tentang "Bagaimanakah sikap masyarakat sejauh ini terhadap diberlakukannya peraturan daerah tersebut di Kabupaten Indragiri Hilir?"berikut jawabannya:

*"Masyarakat sudah menerima bahkan antusias dalam melaksanakan program maghrib mengaji ini. Saat ini hanya tinggal penguatan saja, sehingga pelaksanaan program gemmar mengaji ini begitu terarah di semua kecamatan."*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa masyarakat sudah menerima perda ini .

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja tentang "Bagaimanakah bentuk pengajaran kepada masyarakat untuk gemmar mengaji?" berikut jawabannya:

*"Bentuk pengajaran yang kami lakukan yakni seperti membaca Al-Qur'an secara bergantian menentukan panjang pendek nya ayat yang dibaca, menulis*

*ayat suci Al-Qur'an, dan kami juga mencoba menghafal ayat suci Al-Qur'an."*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat pada masyarakat yakni ibu ayu pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda“ Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peraturan daerah tentang Gerakan Masyarakat Mengaji?” berikut jawabannya:

*“ ya tentu bagus dengan di bentuk nya peraturan ini menjadikan masyarakat khusus nya anak-anak agar pandai mengaji, kadang orang tua dirumah belum tentu paham dengan tadjwid Al-Qur'an untuk mengajari anak-anak belajar mengaji, tetapi tidak anak-anak saja orang tua pun bisa ikut dalam kegiatan ini”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa masyarakat dalam menanggapi perda tentang gerakan masyarakat mengaji ini sudah cukup baik .

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai KelurahanTembilahan pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan tentang “Apakah petugas yang ada telah berkerja sesuai dengan tugasnya ?”berikut jawabannya:

*“85 % petugas bekerja sesuai degan tugasnya. kekurangan pasti ada, Untuk itu pihak Kami tetap melakukan pemantauan melaui pihak desa dan pihak instansi terkait dalam proses pengawasan jalan nya pelaksanaan progam Gemmar mengaji ini. Pembinaan guru mengaji biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat sejauh mana program ini telah berjalan.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis petugas yang bekerja sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat pada tanggal 21 januari 2021 tentang” Apakah petugas yang ada telah melakukan tugasnya?” berikut jawabannya:

*“sudah. sejauh ini sudah cukup bagus kalau belum lancar bacaan nya mereka mengajarnya dengan mengulangi agar tidak lupa”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa petugas yang menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini dikatakan cukup baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-Hudatentang “Bagaimana sikap bapak dalam diberlakukannya perda ini?”berikut jawabannya:

*“Pemerintah daerah dalam hal ini di limpahkan Bupati kepada bagian Kesra, meikapinya sebagai program yang bermanfaat bagi khalayak ramai. Terutama lagi bagi kabupaten Indragiri hilir yang berjulukan kota ibadah, program ini tentu sangat menunjang sekali.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka hasil observasi dan analisis berbeda dikarenakan disposisi peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana yang ada di kecamatan Tembilahan sudah cukup baik dalam melaksanakan program tersebut .Sikap pelaksana sangat penting dalam pengimplementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka



proses pelaksana suatu kebijakan semakin sulit. Kegunaan dan fungsi disposisi adalah untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan dan bersifat segera. Bersifat segera berarti perintah tersebut harus segera dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk dan perintah.

Dalam wawancara penulis dengan Kepala TU Kementerian Agama tanggal 21 januari, Bentuk upaya yang dilakukan kementerian agama dalam kegiatan maghrib kementerian agama yaitu ikut dalam mensukseskan program ini dengan cara memberikan wewenang kepada para Kepala KUA dalam Kabupaten Inhil untuk mengevaluasi serta memantau kegiatan maghrib mengaji di kecamatan dan desa serta memberikan laporan tertulis kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Inhil. kedua bersama dengan pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhil menyusun dan pengesahan Rancangan Perda Maghrib Mengaji dalam hal ini Kementerian Agama merupakan pelaksana dan pengarah kegiatan pada pelaksanaan maghrib mengaji serta menyusun kurikulum maghrib mengaji tersebut, tiga memberikan dana pembinaan untuk TPQ sebagai dana pembinaan terhadap penyelenggara Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut.

Sikap masyarakat terhadap perda ini sangat antusias dalam melaksanakan program maghrib mengaji ini, hanya saja tinggal penguatan saja agar program gerakan masyarakat mengaji ini terarah di semua kecamatan. Terdapat petugas yang bekerja sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-

masing dan petugas yang menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini dikatakan sudah cukup baik.

Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tujuan yang ingin dicapai dari Gerakan Magrib Mengaji ini adalah pertama, menghidupkan kembali tradisi membaca/ mendaras Alquran setiap selesai shalat Magrib di seluruh TPQ yang ada dikeamatan tembilahan Tujuan kedua adalah sebagai upaya menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Alquran bagi kehidupan manusia sehingga Alquran tetap dibaca dan dipelajari sekalipun telah tamat (khatam) dari Taman Pendidikan Alquran. Selanjutnya adalah meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam membaca Alquran, sebagai upaya meminimalisir pengaruh negatif dari media teknologi informasi dan media elektronik, sebagai upaya memakmurkan TPQ dengan kegiatan ibadah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara orang tua, masyarakat dengan unsur pendidikan dan pemerintah, melalui pembinaan karakter anak-anak dengan program mengaji Alquran. Adapun sasaran utama dalam program ini adalah seluruh komponen masyarakat, terutama anak-anak. Diharapkan program Magrib Mengaji ini bukan sekedar mengajarkan baca Alquran saja, tapi juga sebagai pendidikan karakter bagi anak-anak.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanakebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar

memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP itu menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan saran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesrapada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra tentang “Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji?”berikut jawabannya:

*“Pengawasan untuk desa diluar kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu, itu diawasi oleh desa dan kecamatan melalui tokoh agama dan lembaga LKPI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah khususnya pengawasan program maghrib mengaji, sementara terkhusus untuk kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu dilakukan oleh pihak Kesra. Pengawasan dilakukan pertriwulan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut oleh pihak Kesra.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis pengawasan di kecamatan tembilahan diawasi oleh tokoh agama dan lembaga LKPI.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Idrus, M.Pd. I kepala TUkemenag pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 di Kantor Kementerian Agama tentang “bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan gemmar mengaji?” berikut jawabannya:

*“Kewenangan tau lah kita kan kesra sebagai pelaksana sedangkan kementerian agama hanya ikut andil dalam program ini, sebagai pengawasan dan pembina . seandainya dari pihak kesra ada kendala maka dari itu pihak dari kementerian agama melakukan pembinaan ulang, seperti di mesjid A ada kendala di kesra nya jadi kementerian agama yang turun membantu masalah dilapangan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kementerian agama hanya sebagai pengawas dan pembina.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai KelurahanTembilahan pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan tentang “bagaimana strategi pemerintah indragiri hilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program gemmar mengaji?”berikut jawabannya:

*“Strategi yang dilakukan pemerintah inhil yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberi arahan mengenai adanya program ini dan tujuan program gemmar mengaji.”*

Berdasarkan hasil peneliti di atas peneliti dapat menganalisis bahwa strategi yang di lakukan pemerintah inhil ialah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memeberi arahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Tokoh agama pada tanggal 21 Januari 2021 tentang “Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji?”berikut jawabannya:

*“ Dalam bentuk pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan memantau kegiatan maghrib mengaji di mesjid. Melihat apa program gerakan masyarakat mengaji ini berjalan lancar atau tidaknya.”*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis dalam pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara memantau kegiatan maghrib mengaji di mesjid.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yakni ibu ayu pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda tentang “bagaimana menurut bapak/ibuk tentang program gemmar mengaji?” berikut jawabannya:

*“Alhamdulillah sudah diterima dengan baik di kalangan masyarakat . karena gemmar mengaji sangat berpengaruh kepada sikap dan moral,tetapi ya tidak semua masyarakat yang ikut dalam gemmar mengaji ini”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa gemmar mengaji di kecamatan tembilahan saat ini sudah di terima dengan baik di kalangan masyarakat, tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mengikuti program gemmar mengaji ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-

Huda tentang “bagaimanakah sarana yang di berikan pemerintah inhil untuk melakukan gemmar mengaji ini?”berikut jawabannya:

*“Masih kurang, seperti rahel dan Al-Qur’an yang masih kurang dalam melaksanakan program gemmar mengaji ini”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah inhil masih di katakan kurang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka hasil observasi dan analisis berbeda tentang struktur birokrasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan melalui lembaga LKPI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah khususnya pengawasan program maghrib mengaji, dengan cara memantau kegiatan maghrib mengaji di mesjid. terdapat hambatan dalam bidang sarana sehingga membuat tokoh agama menjadi kesulitan untuk menggunakan media internet. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, Struktur birokrasi sangat penting dalam menjalankan perda tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji , dengan kemudian keberhasilan implementasi perlu adanya kerja sama yang baik.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dilapangan dengan kepala bagian kesra pada tanggal 19 januari 2021 yakni bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dengan melalui tokoh agama dan lembaga LKPI sebagai perpanjang tangan dari pemerintah khususnya pengawasan program gerakan masyarakat maghrib mengaji , sementara terkhusus untuk kecamatan tembilahan dan

tembilahan hulu dilakukan oleh pihak Kesra. Pengawasan dilakukan pertriwulan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut oleh pihak Kesra.

Struktur birokrasi ini dikembangkan sebagai respon internal akan waktu dan pelaksana sumber daya yang terbatas dan dimaksudkan untuk membakukan pekerjaan pada organisasi yang kompleks dan luas; struktur organisasi ini seringkali tetap berlaku dikarenakan adanya kekakuan birokrasi. Walaupun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakandikatakan cukup dan para pelaksanamengetahui bagaimanamelakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya tetapi implementasi kebijakan dapat tidak berjalan efektif karena struktur birokrasi yang tidak efektif. Gerakan masyarakat maghrib mengaji ini saat ini sudah di terima di kalangan masyarakat.

Bentuk pengawasan ialah dalam pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara memantau kegiatan maghrib mengaji di mesjid. Masih terdapat kesulitan dalam pengimplementasian pada perda gerakan masyarakat maghrib mengaji seperti kurangnya sarana dan terletak pada internet, banyak tokoh agama yang kesulitan dalam menggunakan media internet. Terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian Gerakan masyarakat maghrib mengaji ini Gerakan masyarakat maghrib mengaji ini.

**C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan)**

**1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan, atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat mengenai kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diimplementasikan serta diinformasikan dengan jelas.

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesra pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra :

*Hambatan yang di temukan diawal program ini di laksanakan yaitu terhambat pada tokoh agamanya, Dimana banyak tokoh agama yang merasa keberatan jika program magrib mengaji dilaksanakan di mesjid. Kebanyakan tokoh agama menginginkan program gemmar mengaji dilaksanakan di rumah, dikarenakan anak yang diajarkan terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari TK, SD, dan SMP, yang apabila dilaksanakan di mesjid ataupun surau akan menimbulkan keributan sehingga berakhir pada teguran dari pihak pengurus mesjid ataupun surau yang bersangkutan. Sementara di perda itu sendiri tertulis bahwa program gemmar mengaji harus dilakukan di mesjid ataupun surau yang aktif. Namun seiring berjalan nya waktu, hambatan tersebut sudah bisa di selesaikan dengan baik.*



Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Idrus, M.Pd. I kepala TUKemenag pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10:00-11:000 di Kantor Kementerian Agama:

*Hambatan yang di dapat setelah perda ini ada yakni terdapat di masyarakat nya karena untuk mensukseskan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini di katakan perda ini berjalan tergantung di masyarakat nya . masyarakat saat itu masih ada yang tidak mengetahui adanya perda ini. Tetapi seiring berjalan nya waktu masyarakat sudah mengetahui dan mulai mengikuti program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini.*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai KelurahanTembilahan pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan:

*Hambatan yang nya terletak di sarana dan prasarana karena disini masih membutuhkan seperti rachel buat mengaji. Alhamdulillah nya untuk saat ini sudah tidak ada hambatan lagi dalam program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini*

Berikut ini wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-Huda:

*Hambatan saat perda itu turun ya masih sepi di mesjid mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui perda tersebut dan Masih banyak mesjid dan mushola yang tidak menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji.*

Berikut ini wawancara peneliti dengan ibu ayu selaku masyarakat pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda:

*Kalo di tanya hambatan nya apa mungkin dari segi sarana dan prasana mungkin ya, karena kadang ada yang bergantian memakai rachel untuk membaca Al-Qur'an*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 Januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja:

*Hambatan ya, selama saya mengajar hambatan yang saya alami tu seperti kalo lagi mengajar mengumpulkan anak-anak untuk mengaji bersama itu agak susah karena harus membujuk kan alhamdulillah ada orang tuanya yang ikut juga otomatis anaknya ikut dalam mesjid.*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat didalam komunikasi yakni seperti tokoh agama dimana tokoh agama merasa keberatan jika program magrib mengaji dilaksanakan di mesjid. Kebanyakan tokoh agama menginginkan program gemar mengaji dilaksanakan di rumah, dikarenakan anak yang diajarkan terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari TK, SD, dan SMP, yang apabila dilaksanakan di mesjid ataupun surau akan menimbulkan keributan sehingga berakhir pada teguran dari pihak pengurus mesjid ataupun surau yang bersangkutan padahal di dalam perda sendiri pelaksanaan dari kegiatan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini harus di laksanakan di mesjid karena di mesjid luas dan bisa menampung masyarakat yang ingin mengikuti gerakan masyarakat maghrib mengaji ini, sedangkan di mushola tempat nya tidak memungkinkan untuk melaksanakan perda tersebut.

Setelah itu terdapat juga dari saranadan prasarana dimana masih ada di beberapa mesjid yang kekurangan Al-Qur'an dan rachel untuk tempat Al-Qur'an, masih adanya masyatakat yang ganti-gantian dalam membaca Al-Qur'an di karena kan tidak cukup, saat perda itu turun ya masih sepi di mesjid mungkin banyak

masyarakat yang tidak mengetahui perda tersebut dan Masih banyak mesjid dan mushola yang tidak menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji. Sosialisasi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti akan program ini banyak masyarakat yang langsung pulang kerumah masing-masing setelah sholat maghrib dan masih banyaknya mesjid yang tidak melakukan kegiatan maghrib mengaji ini di mesjid yang disebabkan sosialisasi yang kurang sehingga membuat perda tentang gerakan masyarakat mengaji ini pengimplementasinya masih kurang.

Terdapat juga hambatan saat mengajar dalam mesjid anak-anak yang ribut dan perlu pengawasan dari orang tuanya masing-masing, karena gerakan masyarakat maghrib mengaji ini semua kalangan masyarakat bisa mengikutinya. Manusia memerlukan sosialisasi agar potensi-potensi kemanusiaannya berkembang sehingga menjadi satu pribadi yang utuh dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pentingnya sosialisasi dalam menjalankan suatu kegiatan karena Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang agar sosialisasi berlangsung sepanjang hidup dan karena manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan keakraban, membutuhkan komunikasi, serta membutuhkan interaksi sosial, proses sosialisasi yang dilakukan melalui proses

pendidikan dan pengajaran. Bentuk pembagian tugas ialah dimana kesra memberi pengajaran secara bertahap , kesra akan mensosialisasikan dengan pihak kecamatan, kemudian pihak kecamatan akan melakukan pembinaan terhadap tenaga pengajar. Dalam beberapa hambatan tersebut ada yang sudah menyelesaikan hambatan dan masih ada juga yang masih dalam proses .

## 2. Sumber Daya

Sumber daya sumber penggerak dan pelaksana, sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesra pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra :

*Hambatan sumber daya untuk melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini tidak ada, karena dalam melaksanakan program ini sudah di lakukan dengan benar*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Idrus, M.Pd.I kepala TU Kemenag pada tanggal 20 Januari pukul 13:00 - 14:00 di Kantor Kementerian

Agama:

*Tidak ada hambatan sumber daya dalam pelaksanaan program gemmar mengaji ini, di karenakan proses perekrutan betul-betul di lakukan dengan teliti dan benar-benar orang kompeten di bidang nya*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai Kelurahan Tembilahan pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan:

*Hambatan yang ada kurangnya jumlah tenaga pengajar untuk menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini. Karena peran tenaga pengajar sangat butuh kan, dalam pengimplementasikan perda ini. Masih ada mesjid yang tidak melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini.*

Berikut ini wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin yakni sebagai tokoh agama pada tanggal 22 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di lingkungan Mesjid Al-Huda:

*Dalam menjalankan program ini tidak ada hambatan sama sekali, semua dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah di bikin pemerintah*

Berikut ini wawancara peneliti dengan ibu ayu selaku masyarakat pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda:

*Kalo hambatan kurang tau ya, tetapi sejauh ini semenjak dimulainya program ini tidakada hambatan di sumber dayanya*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja:

*Hambatan nya ya kalo bisa Al-Qur'an di tambah sama rachel mengaji juga karena banyak juga masyarakat yang tidak kebagian rachel untuk membaca Al-Qur'an. Kami di upah sebesar Rp.300.000.00 sebulan itu pun kadang bulan ini dapat kadang bulan besok enggak di beri, tapi ya saya merasa tidakapa kan sekalian mengajar untuk kebaikan masyarakat juga.*

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat yang terdapat di sumber daya tidak terdapat suatu hambatan di katakan sumber daya dalam melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sudah di katakana sudah baik dalam pengimplementasian perda tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji ini. Sumber daya sangat di butuhkan dalam menjalankan program ini yaitu seperti tenaga pengajar dan masyarakatsebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya sangat penting dalam menjalankan suatu program karena di katakan sukses program itu disaat sumber daya nya tidak terdapat masalah atau hambatan .Di dalam wawancara peneliti tersebut di katakan sumber daya dalam melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sudah benar karena sudah melakukan dan menjalanka sesuai prosedur yang di berikan . dan setiap masing-masing petugas dalam menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini proses perekrutan betul-betul di lakukan dengan teliti dan benar-benar orang kompeten di bidang nya.

Saat peneliti wawancara dengan bapak kelurahan di wawancara itu bapak kelurahan mengatakan bahwa hambatan dalam sumber daya ini masih ada seperti tenaga pengajar, yakni tenaga pengajar yang jumlah nya masih kurang, di perlukan tenaga pengajar yang lain untuk melakanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji di Tembilahan dan masih terdapat kekurangan seperti Al-Qur'an.

Bentuk pembiayaan untuk tenaga pengajar yakni di bayarkan oleh kesrayaitu senilai Rp.300.000.00. jika dihitung untuk per 6 bulan sekali maka hasilnya untuk setiap tenaga pengajar memperoleh jumlah dengan total Rp.1.800.000.00.terkhusus kecamatan tembilahan dan tembilahan hulu pengawasannya di perketat dikarenakan menjadi ikon percontohan bagi kecamatan lainnya. Sumber daya untuk menjalankan program gerakan masyarakat mengaji ini sudah cukup baik, akan tetapi masih adanya tenaga pengajar yang tidak mendapatkan upah insentif yang tidak sesuai dengan perda Gemmar Mengaji dan terkadang upah yang di berikan kan yang seaturannya mendakan tiap bulan tetapi tidak di beri oleh pemerintah. Sumber daya ini bahwa merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan) yang dimiliki masing-masing individu manusia.

Dalam hal ini masih terdapatnya tenaga pengajar yang tidak mendapatkan gaji sesuai dengan yang berada di dalam Perda Gerakan masyarakat maghrib mengaji dan masih tedapatnya mesjid yang tidak menjalankan Perda Gerakan masyatakat meghrib mengaji ini.

Di temukan juga mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini adanya mesjid maupun mushola yang tidak menjalankan perda ini, tetapi tidak semua mesjid ada sebagian mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini, kebanyakan di

mushola yang tidak menjalankan Perda ini karena tempat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tentunya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Idrus, M.Pd.I kepala TU Kemenag pada tanggal 20 Januari pukul 13:00 - 14:00 di Kantor Kementerian Agama:

*Hambatan dalam sikap pelaksana ini tidak ada, karena semua petugas yang menjalankan atau melaksanakan program ini sudah benar-benar melakukan tugas nya masing-masing*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesrapada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra :

*Tidak ada hambatan dalam sikap pelaksana saat ini, semua berjalan sesuai dengan keinginan bersama*



Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli sebagai Kelurahan Tembilahan pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13:00-14:00 wib di Kantor Kelurahan Tembilahan:

*Dalam sikap pelaksana ini mungkin hambatan nya terletak di tenaga pengajar nya, karena masih membutuhkan banyak untuk tenaga pengajar*

Berikut ini wawancara peneliti dengan ibu ayu selaku masyarakat pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda:

*Hambatannya tidak ada seperti nya tenaga pengajar nya baik, sabar buat mengajar tetapi Mau nya tenaga pengajarnya di tambah jadi kalo yang satu sakit jadi ada yang menggantikan untuk mengajari, kalo sendirikan susah ya, lebih baiknya tenaga pengajarnya*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja:

*Hambatannya kami disini kurang anggota untuk mengajari, tidak 1 mesjid 1 tenaga pengajar minimal 2 tenaga yang ahli di bidangnya untuk melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin pada tanggal 20 Januari pukul 16:00 – 17:00 di lingkungan Mesjid Al-Huda:

*Hambatannya dalam menjalankan Perda ini adalah pada awal di berlakukannya kebijakan ini, semua pihak tidak menerima program tersebut dengan mudah. Namun pemerintah daerah tidak patah arang dalam menyikapinya, pelan-pelan di lakukan pembinaan kepada pihak kecamatan kemudian kepada pihak masyarakat yang berhasil di kumpulkan hingga semua pihak mampu dan mengerti dengan arah program ini dijalankan. Sehingga menimbulkan sikap antusias dari masyarakat dalam*

*melaksanakannya disini masyarakat masih kurang keinginan masyarakat untuk mengaji dimesjid dan mushalla sesudah sholat maghrib.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat yang terdapat di Disposisi sikap pelaksana yang ada di kecamatan Tembilahan sudah cukup baik dalam melaksanakan program tersebut . Sikap pelaksana sangat penting dalam pengimplementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan semakin sulit.

Sikap masyarakat terhadap perda ini sangat antusias dalam melaksanakan program maghrib mengaji ini, hanya saja tinggal penguatan saja agar program gerakan masyarakat mengaji ini terarah di semua kecamatan. Terdapat petugas yang bekerja sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing dan petugas yang menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini dikatakan sudah cukup baik.

Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji tujuan yang ingin dicapai dari Gerakan Magrib Mengaji ini adalah pertama, menghidupkan kembali tradisi membaca/ mendaras Alquran setiap selesai shalat Magrib di seluruh TPQ yang ada di kecamatan tembilahan Tujuan kedua adalah sebagai upaya menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Alquran bagi kehidupan manusia

sehingga Alquran tetap dibaca dan dipelajari sekalipun telah tamat (khatam) dari Taman Pendidikan Alquran.

Selanjutnya adalah meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam membaca Alquran, sebagai upaya meminimalisir pengaruh negatif dari media teknologi informasi dan media elektronik, sebagai upaya memakmurkan TPQ dengan kegiatan ibadah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara orang tua, masyarakat dengan unsur pendidikan dan pemerintah, melalui pembinaan karakter anak-anak dengan program mengaji Alquran. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan masih dibutuhkan tenaga pengajar untuk melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini. Sikap pelaksana sangat penting dalam pengimplementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan semakin sulit. Kegunaan dan fungsi disposisi adalah untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan dan

bersifat segera. Bersifat segera berarti perintah tersebut harus segera dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk dan perintah.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP itu menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan saran kebijakan.

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Syukur. S.Pd kepala Sub Bidang Kesra pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:00-11:00 wib di Kantor Kesra :

*Kurangnya sarana dan prasarana merupakan hambatan yang besar bagi kelancaran pelaksanaan Sarana dan prasarana yang dimaksudkan disini adalah semua perlengkapan atau peralatan yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran tetapi saat ini hambatan tersebut sudah di selesaikan dengan baik*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Idrus, M.Pd.I kepala TU Kemenag pada tanggal 20 Januari pukul 13:00 - 14:00 di Kantor Kementerian Agama:

*Yang menjadi pengahambat dalam struktur birokrasi ini terdapat di sarana, karena sarana sangat penting dalam pengimplementasian program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini seperti buku yang sangat mendukung proses pelaksanaan program ini*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli kelurahan Tembilihan pada tanggal 21 Januari pukul 10:00 – 11:00:

*Hambatan terbesar dalam pengimplementasian program ini yaitu hambatan dalam bidang sarana, terutama pada bidang telekomunikasi terkhusus perangkat internet, ada banyak tokoh agama yang masih kesulitan untuk menggunakan media internet, sehingga pihak Kesra mensiasatinya dengan mencetak buku untuk mendukung proses pelaksanaan program ini, media cetak pun sulit untuk di terapkan oleh guru/ pengajar, sehingga cara terakhir pihak Kesra memberikan nomor ponsel untuk proses komunikasi dengan tokoh agama yang aktif mengajar apabila ditemukan kendala yang dialami tokoh, sehingga proses pembinaan tetap bisa berjalan*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Ustadz Abidin pada tanggal 20 Januari pukul 16:00 – 17:00 di lingkungan Mesjid Al-Huda:

*Keikutsertaan orang tua dalam program gerakan masyarakat maghrib mengaji, baca tulis al-Qur'an sangat minim. Karena peran orang tua sangat berpengaruh dalam program ini. program ini lebih baik orang tua dan anaknya*

Berikut ini bentuk wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi Tenaga Pengajar pada tanggal 21 januari 2021 jam 20:00-21:00 wib di Ruang Kerja:

*hambatan dalam pembelajaran, tapi tidak kalah pentingnya ada kitab suci al-Qur'an karena tidak semua peserta didik memakai al-Qur'an nya sendiri, melainkan al-Qur'an temannya yang terkadang dipakai untuk belajar dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran al-Qur'an*

Berikut ini wawancara peneliti dengan ibu ayu selaku masyarakat pada tanggal 19 januari 2021 pukul 16:00-17:00 wib di Mesjid Al-Huda:

*Tidak ada hambatan dalam struktur ini semua sudah menjalankan tugas nya masing-masing seperti tenaga pengajar sudah cukup baik dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak maupun orang dewasa yang ingin memperbaiki tadjwid nya dalam membaca Al-Qur'an.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat yang terdapat distuktur organisasi yakni masih terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini masih Kurangnya sarana dan prasarana merupakan hambatan yang besar bagi kelancaran pelaksanaan Sarana dan prasarana yang dimaksudkan disini adalah semua perlengkapan atau peralatan yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, karena sarana dan prasarana sangat penting dalam menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini.

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, Struktur birokrasi sangat penting dalam menjalankan perda tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji , dengan kemudian keberhasilan implementasi perlu adanya kerja sama yang baik.

Terdapat juga hambatan dalam bidang sarana, terutama pada bidang telekomunikasi terkhusus perangkat internet, ada banyak tokoh agama yang masih kesulitan untuk menggunakan media internet, sehingga pihak Kesra mensiasatinya dengan mencetak buku untuk mendukung proses pelaksanaan program ini, media cetak pun sulit untuk di terapkan oleh guru/ pengajar, sehingga cara terakhir pihak Kesra memberikan nomor ponsel untuk proses komunikasi dengan tokoh agama yang aktif mengajar apabila ditemukan kendala yang dialami tokoh, sehingga proses pembinaan tetap bisa berjalan. sarana dan prasarana merupakan hambatan yang besar bagi kelancaran pelaksanaan Sarana dan prasarana dan tempat yang dimaksudkan disini adalah semua perlengkapan atau peralatan yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sebab dalam pembelajaran akan terasa sulit bila sarana seperti buku, Al-Qur'an yang masih kurang akan mengganggu suasana pembelajaran.

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembilahan) masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti akan program ini banyak masyarakat yang langsung pulang kerumah masing-masing setelah sholat maghrib dan masih banyaknya mesjid yang tidak melakukan kegiatan masgrib mengaji ini di mesjid yang disebabkan sosialisasi yang kurang sehingga membuat perda tentang gerakan masyarakat mengaji ini pengimplementasinya masih kurang, terdapat di

tokoh agamanya, Dimana banyak tokoh agama yang merasa keberatan jika program magrib mengaji dilaksanakan di mesjid.

Kebanyakan tokoh agama menginginkan program gemmar mengaji dilaksanakan di rumah, dikarenakan anak yang diajarkan terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari TK, SD, dan SMP, yang apabila dilaksanakan di mesjid ataupun surau akan menimbulkan keributan sehingga berakhir pada teguran dari pihak pengurus mesjid ataupun surau yang bersangkutan. Sementara di perda itu sendiri tertulis bahwa program gemmar mengaji harus dilakukan di mesjid ataupun surau yang aktif. Pada saat awal Perda ini di keluarkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti adanya perda ini. Tetapi seiring berjalan nya waktu masyarakat sudah mengetahui dan mulai mengikuti program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini.

Dari wawancara tentang sumber daya terdapat penulis dapat menganalisis bahwa jumlah tenaga pengajar untuk menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini masih kurang. Karena peran tenaga pengajar sangat butuh, dalam pengimplementasikan. sumber daya ini yang paling berpengaruh dalam mewujudkan program gerakan masyarakat maghrib mengaji yaitu adalah tenaga pengajar.

Sumber daya sangat di butuhkan dalam menjalankan program ini yaitu seperti tenaga pengajar dan masyarakat sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Menurut Bapak Syukur. S.Pd



kepala Sub Bidang Kesra tidak ada hambatan dalam sumber daya untuk menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini, karena baginya karena dalam melaksanakan program ini sudah di lakukan dengan benar .

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan faktor penghambat dalam pengimplementasian perda ini terletak diHambatan nya Al-Qur'an di tambah sama rachel mengaji juga karena banyak juga masyarakat yang tidak kebagian rachel untuk membaca Al-Qur'an. Di temukan juga mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini adanya mesjid maupun mushola yang tidak menjalankan perda ini, tetapi tidak semua mesjid ada sebagian mesjid dan mushola yang menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini, kebanyakan di mushola yang tidak menjalankan Perda ini karena tempat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan Perda Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini.

Dari hasil wawancara tentang disposisi (sikap pelaksana) penulis dapat menganalisis bahwa sikap pelaksana pemerintah dalam menjalankan program gerakan masyarakat maghrib mengaji ini sudah menjalankan tugas nya dengan sangat baik sudah benar-benar melakukan tugas nya masing-masing.Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelakasana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. disposisi

merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bahwasamasih di butuhkan nya tenaga pengajar untuk melaksanakan program gerakan masyarakat maghrib

mengaji ini. Sikap pelaksana sangat penting dalam pengimplementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan semakin sulit. Kegunaan dan fungsi disposisi adalah untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan dan bersifat segera. Bersifat segera berarti perintah tersebut harus segera dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk dan perintah.

Struktur biroktasi suatu tatanan kerja tentang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditranformasikan, maka imolementasi kebijakan dlakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara tentang struktur birokrasi maka penulis dapat menganalisis hambatanya terletak di sarana dan prasarana merupakan hambatan yang besar bagi kelancaran pelaksanaan Sarana dan prasarana dan tempat yang dimaksudkan disini adalah semua perlengkapan atau peralatan yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sebab dalam pembelajaran akan terasa sulit

bila sarana seperti buku, Al-Qur'an yang masih kurang akan mengganggu suasana pembelajaran.

Terutama pada bidang telekomunikasi terkhusus perangkat internet, ada banyak tokoh agama yang masih kesulitan untuk menggunakan media internet, sehingga pihak Kesra mensiasatinya dengan mencetak buku untuk mendukung proses pelaksanaan program ini, media cetak pun sulit untuk di terapkan oleh guru/ pengajar, sehingga cara terakhir pihak Kesra memberikan nomor ponsel untuk proses komunikasi dengan tokoh agama yang aktif mengajar apabila ditemukan kendala yang dialami tokoh, sehingga proses pembinaan tetap bisa berjalan. Tempat merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang menunjang terlaksananya suatu usaha atau kegiatan, demikian pula halnya dalam proses pembelajaran. Motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang atau suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah "pendorongan" suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motif adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah dorongan yang timbul

dari luar diri seorang sehingga mendapatkan dorongan atau rangsangan untuk melakukan sesuatu. Jadi dorongan itu ada dua macam, dorongan yang timbul dari dalam seseorang dan dorongan yang timbul dari luar misalnya dorongan orang tua terhadap anaknya dan sebagainya. Pemberian motivasi kepada seseorang mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang, sebagaimana pendapat berikut ini Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu hingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Sebab peran aktif orang tua untuk menyuruh anaknya ke mesjid, untuk menyuruh anaknya mengaji di sini sangat penting dengan adanya perda gerakan masyarakat maghrib mengaji ini membuat kita lebih tau tentang tadjwid Al-Qur'an, bacaan ayat Al-Qur'an dan menulis ayat suci Al-Qur'an.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan yakni:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan di semua kecamatan khususnya di kecamatan Tembilahan, tetapi dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang kepada masyarakatnya.
- 2) Masih terdapat beberapa faktor tidak mendukung dalam pengimplementasian peraturan tersebut yakni: faktor tenaga pengajar yang masih kurang dan adanya tenaga pengajar yang belum pernah ikut dalam pelatihan, faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam ikut untuk mengaji dimesjid dan mushalla sesudah sholat maghrib, dan berpartisipasi untuk menjalankan dan mensukseskan Peraturan Daerah

#### B. Saran

Berdasarkan pengamatan dilapangan mengenai program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan penulis dengan rendah hati memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah telah memaksimalkan kinerjanya, artinya pemerintah bukan hanya sebagai pembuat aturan akan tetapi juga mampu dalam proses pengimplementasian baik itu tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa terpelosok. Alangkah baiknya jika pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Tembilahan dalam memberikan pelatihan terhadap tenaga pengajar, sebab akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian yang ingin dicapai. Seperti misalnya mempersiapkan fasilitas pendukung pada kegiatan maghrib mengaji ini.
2. Diharapkan kepada setiap orang tua memotivasi anaknya untuk mau melaksanakan kegiatan GEMMAR MENGAJI di mesjid dan juga di harapkan kepada orang tua juga melakukan kegiatan mengaji tersebut.
3. Dengan GEMMAR MENGAJI diharapkan dapat membangkitkan kembali budaya mengaji dan menghindari pengaruh negatif di kalangan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Agustini, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Effendy, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Gunawan Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herdiansyah, Haris, 2014. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pres
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmuzar. 2014. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Nusamedia
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- \_\_\_\_\_,2015. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

- \_\_\_\_\_, 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta
- Patton, Quinn, Michael. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Patilima, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu pemerintahan* Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dari Formulasi*. PT Elex Media Kumputindo. Jakarta
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepimpinan Dalam Manajemen*. Rajawali. Jakarta
- Wahab, Solihin Abdul. 2005, *Analisis Dari Formalasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta



Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Rineka Cipta.

Jakarta

Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Kontrol*

*Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya*

Zulkifli, dkk.2013.*Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR

Utami, Restifina (Dalam Skripsi). 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Universitas Islam Riau.

Wandika, Nusfi (Dalam Skripsi). 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Studi di Kecamatan Keritang. Universitas Islam Riau.

#### **Sumber Internet:**

- Konsep Gemmar Mangaji
- <https://scholar.google.co.id/scholar?hl&q=konsep+gemar+mengaji&oq>

#### **Dokumentasi:**

- Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Jurnal :**

- Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Magrib Mengajidi Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam
- Implementasi Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengajidi Kecamatan Banjar Kota Banjar
- Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengajidi Kabupaten Kampar
- Hubungan Negara dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengajidi Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015)
- Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik Tahun 2017